

PENDAMPINGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL SEBAGAI UPAYA ADAPTASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI ERA *NEW NORMAL*

Deby Febriyan Eprilianto¹, Yuni Lestari², Suci Megawati³, Trenda Aktiva Oktariyanda⁴

^{1,3,4} Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

² Program Studi D4 Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: debyepriianto@unesa.ac.id , yunilestari@unesa.ac.id , sucimegawati@unesa.ac.id , trendaoktariyanda@unesa.ac.id

Abstrak

Bencana pandemi Covid-19 memberikan dampak perubahan yang luar biasa disemua sektor, termasuk sektor publik. Nyatanya pandemic Covid-19 ini menjadi momentum yang tepat dalam percepatan digitalisasi sektor publik. Tetapi realitas dilapangan menunjukkan bahwa banyak pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) kesulitan dalam mendukung penerapan *e-government* ini. Bukan hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang harus beradaptasi dengan digital, melainkan pemerintah desa juga diharuskan untuk menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan akan digital ini. Salah satu pemerintah desa yang mengalami keterbatasan dalam melakukan pengembangan *e-government* yaitu Pemerintah Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Kegiatan pendampingan tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai upaya adaptasi desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di era *new normal* sangat perlu dilakukan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu pengembangan *platform* sistem informasi desa dan pelatihan pengelolaannya. Pengembangan sistem informasi desa melalui tahap pembuatan *website* desa dengan platform desatlemang.org. Sedangkan dalam pelatihan yaitu melalui penyampaian materi tentang sistem informasi desa dan pengenalan *website* desa yang telah dikembangkan, selain itu juga dilakukan metode *pre-test* dan *post-test* untuk evaluasi kegiatan pelatihan yang telah dilakukan. Hasil dari kegiatan ini tim berhasil mengembangkan platform sistem informasi Desa Tlemang dengan url desatlemang.org yang disesuaikan dengan kebutuhan yaitu fitur pelayanan publik, fitur informasi desa dan fitur pengelolaan data desa. Selanjutnya pelatihan yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman perangkat desa dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan *platform* tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memberikan perubahan pada Pemerintah Desa Tlemang yang sebelumnya belum memiliki *website* desa menjadi memiliki *website* desa. Sedangkan dalam kegiatan pelatihan dari hasil *pre-test* dan *post-test* disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman perangkat desa terkait dengan *website* desa dan kegunaannya. Besar harapan dengan pengembangan yang dilakukan dapat memberikan kebermanfaatan bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di era *new normal* ini kepada masyarakat.

Kata kunci: Sistem Informasi Desa, *Electronic Government*, Pendampingan Pemerintah Desa

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a massive impact on all sectors, including government. In fact, the Covid-19 pandemic has provided the necessary impetus to accelerate the digitalization of the public sector. However, reality shows that many governments, both central and local (provincial and district/city), are having difficulty supporting the implementation of e-government. Not only must the central government and local governments (provincial and district/city) adapt to digital, but village governments must adapt to the development and need for digital as well. Tlemang Village Government, Ngimbang District, Lamongan Regency, is one of the village governments experiencing difficulties in developing e-government. Assistance activities for digital-based governance are required in order to adapt villages in the implementation of public services in the new normal era. The method used in this activity is the creation of a village information system

platform and management training. Development of a village information system through the stage of creating a village website with the desatlemang.org platform. While in the training, namely through the delivery of material about the village information system and the introduction of village sites that have been developed, in addition, pre-test and post-test are also carried out to evaluate the activities that have been carried out. As a result of this activity, the team was able to create a Tlemang village information system platform with the url desatlemang.org that was specifically tailored to the needs, namely public service features, village information features, and village data management features. Furthermore, the training can improve village officials' and the community's understanding of how to manage and use the platform. This activities have changed the Tlemang Village Government which previously did not have a village website to have a village website. Meanwhile, in the training activities, from the result of the the pre-test and post-test, it was concluded that there was an increase in the understanding of village officials related to village websites and their uses. It is hoped that the development will benefit the village government in the implementation of public services to the community in this new normal era.

Keywords: Village Information System, Electronic Government, Village Government Assistance

PENDAHULUAN

Tantangan pelayanan publik yang dihadapi saat ini semakin berat dan kompleks serta ditambah dengan adanya pandemi Covid-19. Perlu adanya kebijakan-kebijakan terobosan dan inovatif dalam rangka mengatasi permasalahan dengan tetap berorientasi kepada pelayanan publik terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Keputusan dan kebijakan yang diambil terutama terkait digitalisasi harus secara jelas, tegas dan *clear* memberikan dampak dalam rangka mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat (Muhyiddin, 2020). Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi sebagaimana definisi pada Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pemerintahan dibentuk antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bermakna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Harapan akan pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang murah, pelayanan bermutu dan pelayanan yang transparan. Karena itu, pelayanan publik harus didukung dengan SDM-SDM unggul yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah dituntut tanggap atas harapan masyarakat dan tantangan global yang dipicu oleh perubahan dan kemajuan terutama di bidang teknologi. Dunia telah berubah dimana aktivitas dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital (Eprilianto, dkk 2019, dan Nugroho, 2018). Masyarakat semakin lama semakin smart dan semakin *well informed* sehingga masyarakat ada kecenderungan “menuntut lebih” atas layanan publik (Kumar 2018). Selain itu, saat ini perubahan berjalan dengan begitu cepat dan bertubi-tubi sehingga layanan yang dulu dibangga-banggakan bisa jadi sekarang sudah dianggap usang atau sudah ketinggalan zaman (Heeks, 2011). Pemerintah dituntut untuk memberikan layanan berbasis teknologi informasi dengan perbaikan proses bisnisnya sehingga layanan akan lebih cepat, mudah dan murah dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas (Adam, 2020).

Paling tidak ada empat hal yang perlu dilakukan dalam memberikan pelayanan publik di era digital (Wahidah, 2020), yaitu:

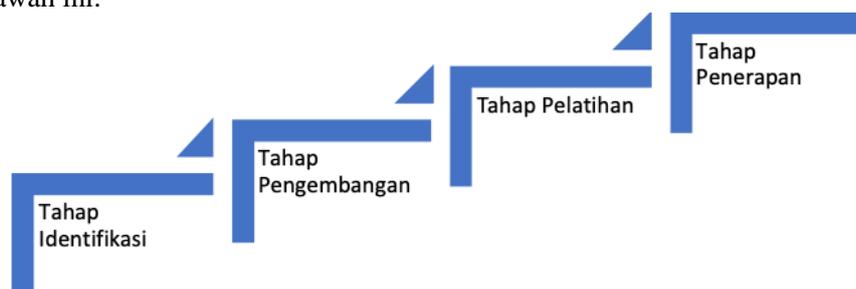
1. Melakukan identifikasi kembali proses bisnis yang relevan dengan tujuan utama pemerintah sehingga digitalisasi dibarengi dengan perubahan proses bisnisnya.
2. Layanan yang diberikan kepada masyarakat diupayakan real time/instant dan diinformasikan kepada masyarakat (kejelasan dan kepastian layanan). Kita bisa melihat bagaimana dalam kondisi pandemi ini masyarakat menginginkan informasi yang real time atas perkembangan penanganannya. Pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan eksplorasi cara-cara baru dalam memberikan informasi terkini dan layanan kepada publik sebagai upaya untuk mengelola efek pandemi.

3. Mengembangkan perangkat digital yang mendukung mobilitas pegawai sehingga mempermudah semua aktivitas dan kolaborasi antar pegawai dalam operasional serta pemberian layanan kepada masyarakat. Pandemi telah memaksa pola kerja baru di mana pegawai melakukan pekerjaan dari rumah atau *Work From Home* (WFH). Perkembangan sat ini menuntut pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan dilakukan lebih fleksibel dan dapat diberikan dari manapun.
4. Melakukan modifikasi proses bisnis sebagai respon atas perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat di era digital. Tantangan ke depan terkait pelayanan publik semakin menarik karena kehidupan masyarakat telah sangat berubah dimana mereka menuntut layanan yang semakin cepat, mudah, murah, dan transparan.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat juga harus melakukan berbagai upaya untuk beradaptasi dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya (Apriyansyah, 2018). Di era new normal ini segala aktivitas pemerintah diarahkan berbasis digital, tak luput juga pemerintah desa. Oleh karena itu penting dilakukan pengembangan berbagai aplikasi/platform yang dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya yaitu pelayanan publik kepada masyarakat. Sangat terbatas sekali pemerintah desa yang sudah berhasil mengembangkan website desa, tetapi banyak juga belum berhasil. Hal ini dikarenakan berbagai faktor baik internal maupun eksternal dari pemerintah desa terkait. Salah satu desa yang belum berhasil mengembangkan aplikasi *website* desa atau SID (Sistem Infomasi Desa) yaitu Pemerintah Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu kegiatan ini dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Surabaya dengan topik pendampingan tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai upaya adaptasi desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di era *new normal* pada Pemerintah Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan.

METODE

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pertama *focus discussion group* pada tahap identifikasi masalah, kebutuhan dan kesiapan pemerintah desa. Metode yang digunakan selanjutnya yaitu pengembangan *platform* digital sistem informasi desa. Pada metode ini tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Surabaya membuat dan mengembangkan *platform* digital sistem informasi desa dengan url desatlemang.org yang disesuaikan dengan identifikasi masalah, kebutuhan dan kesiapan Pemerintah Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Menu yang dikembangkan dalam platform digital sistem informasi desa ini yaitu a) menu untuk melakukan pelayanan publik, b) menu untuk mengelola informasi desa, dan c) menu untuk mengolah data desa. Pengembangan menu tersebut dilakukan melalui identifikasi kebutuhan melalui wawancara secara terstruktur kepada kepala desa, perangkat desa dan masyarakat Desa Tlemang, observasi langsung dan dokumentasi. Selain metode tersebut, metode lain yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu pelatihan kepada perangkat desa dan masyarakat terkait dengan pengenalan dan pengelolaan platform digital sistem informasi desa yang telah dikembangkan. Pelatihan dilakukan secara terpusat di balai Desa Tlemang yang diikuti oleh 15 orang yang terdiri dari perangkat desa, kepala dukuh, perwakilan masyarakat. Tahapan dalam pengabdian masyarakat ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1 : Tahapan dalam Kegiatan Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Surabaya dengan jumlah 4 orang. Pengabdian ini mengambil topik tentang pendampingan tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai upaya adaptasi desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di era *new normal*. Pemerintah desa yang dilakukan pendampingan yaitu Pemerintah Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Tim pengabdian berdasarkan tingkat pendidikan, keahlian dan konsentrasinya dapat diidentifikasi pada gambar dibawah ini.



Gambar 2 : Jumlah Tim Pengabdian Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Konsentrasi dan Keahlian

Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dianalisis dari tahapan yang telah dilakukan. Tahapan yang telah dilakukan merupakan serangkaian kegiatan yang berkelanjutan yang saling terikat satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Hasil analisis masing-masing tahapan dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

1. Tahap Identifikasi

Tahapan pertama yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu tahap identifikasi masalah, kebutuhan dan kesiapan Pemerintah Desa Tlemang dalam melakukan pengembangan dan penerapan sistem informasi desa. Kegiatan pada tahapan ini dilakukan dengan metode *focus discussion group* antara tim pengabdian dengan kepala desa, perangkat desa dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di balai Desa Tlemang yang membahas terkait dengan permasalahan, analisis kebutuhan dan kesiapan Pemerintah Desa Tlemang dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi desa. Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3 : Focus Group Discussion pada Tahap Identifikasi

Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan terdapat permasalahan mendasar dari Pemerintah Desa Tlemang terkait dengan pengembangan sistem informasi desa yaitu keterbatasan sumber daya manusia (perangkat desa), kondisi sosial ekonomi masyarakat dan budaya pelayanan manual yang masih digunakan. Oleh karena itu Pemerintah Desa Tlemang tidak dapat mengembangkan secara mandiri sistem informasi desanya. Sedangkan dari analisis kebutuhan bahwa perangkat desa menyampaikan setidaknya ada tiga kebutuhan mendasar akan perubahan penyelenggaraan pemerintah desa berbasis digital yaitu a) perubahan pelayanan publik, b) perubahan penyampaian informasi desa, dan c) perubahan akan pengolahan data desa. Ketiga analisis kebutuhan ini yang menjadi dasar tim pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan platform digital yang sesuai.

Terakhir pada tahapan ini dilakukan analisis terhadap kesiapan Pemerintah Desa Tlemang. Dari data di lapangan menunjukkan bahwa dari tiga aspek penting dalam pengembangan e-government yaitu kesiapan sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur teknologi dan kesiapan kebijakan, Pemerintah Desa Tlemang belum cukup siap untuk mengembangkan sistem informasi desa. Kesiapan sumber daya manusia atau perangkat desa menunjukkan bawah jumlah perangkat sebanyak 8 orang dengan rincian sebagai berikut 2 orang lulusan Sarjana, dan 6 orang lulusan SMA. Dari kedelapan perangkat desa tersebut semuanya berjenis kelamin laki-laki. Selainitu dari hasil identifikasi menunjukkan bahwa perangkat desa belum pernah mengikuti program pelatihan yang mendukung pengembangan dan pengelolaan sistem informasi desa sama sekali.

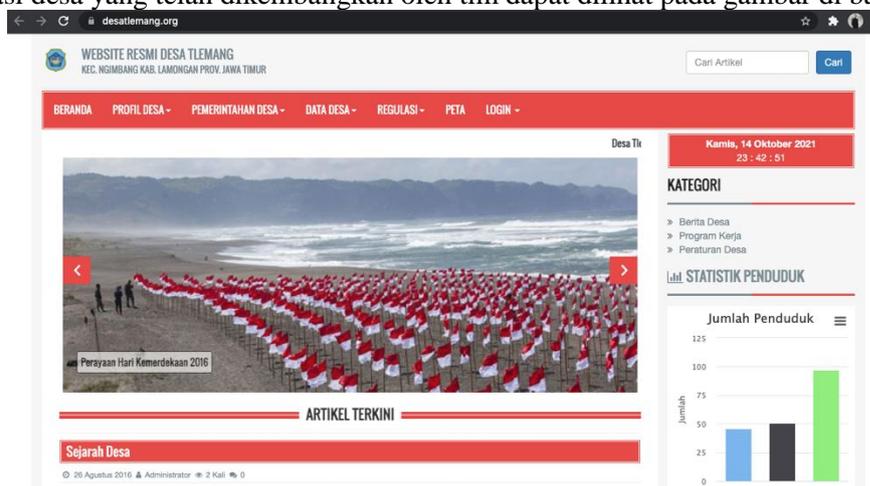
Selanjutnya dari aspek kesiapan infrastruktur teknologi, Pemerintah Desa Tlemang memiliki infrastruktur teknologi yang sangat terbatas. Dari hasil identifikasi di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tlemang memiliki 2 unit perangkat computer, 1 unit laptop, 1 unit *Wifi*, dan 1 unit printer yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahannya. Ketersediaan tersebut bias dikatakan belum cukup untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan sistem informasi desa. Terakhir dari aspek kebijakan juga Pemerintah Desa Tlemang belum memiliki peraturan desa dan sejenisnya untuk memastikan proses pengembangan dan pengelolaan sistem informasi desa dapat berjalan secara optimal. Setidaknya terdapat beberapa kebijakan yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sistem informasi desa baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Lamongan). Peraturan-peraturan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:



Gambar 4 : Kebijakan yang Menjadi Dasar Pengembangan Sistem Informasi Desa

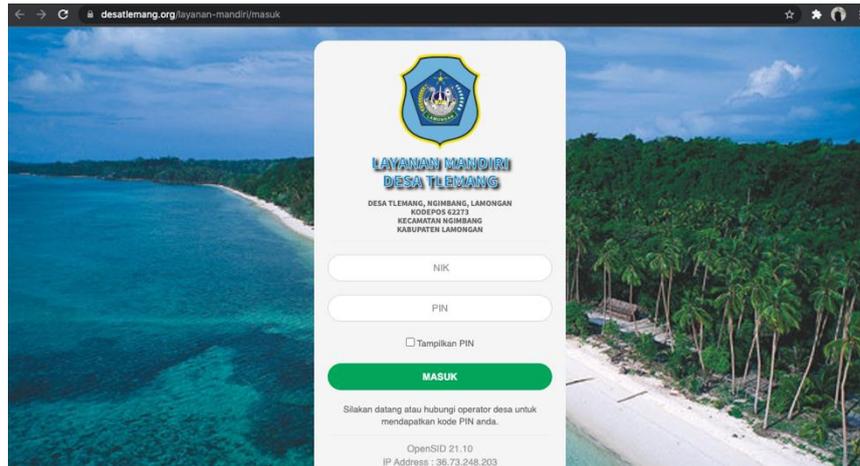
2. Tahap Pengembangan

Pada tahap pengembangan ini tim pengabdian melakukan pembuatan dan pengembangan platform digital sistem informasi desa. Pembuatan dan pengembangan platform digital sistem informasi desa didasarkan pada hasil analisis tahap sebelumnya yaitu tahap identifikasi. Dari hasil analisis dan identifikasi pada tahap sebelumnya maka tim mengembangkan platform digital sistem informasi desa berbasis website untuk Desa Tlemang dengan URL desatlemang.org. Tampilan *interface* pada platform digital sistem informasi desa yang telah dikembangkan oleh tim dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

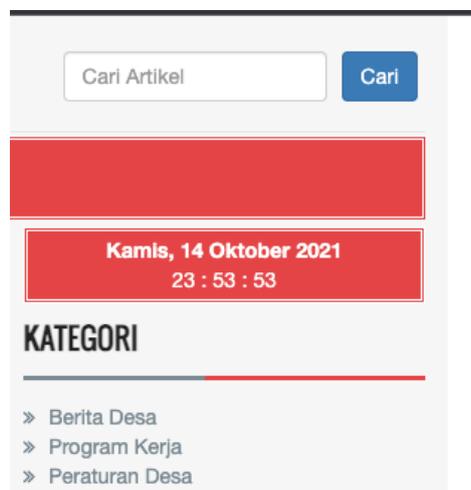


Gambar 5 : Tampilan Utama Platform Digital desatlemang.org

Terdapat beberapa menu yang telah di *create* atau dikembangkan oleh tim pengabdian. Menu tersebut diidentifikasi sesuai dengan analisis kebutuhan yang disampaikan oleh perangkat desa pada tahap identifikasi. Setidaknya 3 menu utama yang dibuatkan oleh tim. *Pertama* menu pelayanan publik secara mandiri, menu ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Tlemang untuk mengakses pelayanan publik secara digital. Pelayanan yang dapat diakses melalui menu ini antara lain yaitu pengurusan surat pengantar desa seperti surat keterangan kematian, kelahiran, pindah penduduk, kemiskinan dan lain sebagainya. Untuk mengakses menu ini masyarakat tinggal memasukkan NIK dan pin yang dapat diperoleh ke operator atau perangkat desa. *Kedua* yaitu menu pengelolaan informasi desa. Pengelolaan informasi desa dapat dilakukan oleh perangkat desa atau operator saja. Pengelolaan informasi desa terdiri dari profil desa, visi misi desa, potensi desa, regulasi desa dan sebagainya. Dimana informasi desa tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas. *Ketiga* yaitu menu pengolahan data desa. Seperti menu sebelumnya, menu ini hanya dapat dikelola oleh perangkat desa atau operator desa mulai dari pengumpulan data, *entry* data, mengolah data, menyajikan data dan mengupdate data desa. Dari hasil pengolahan data desa tersebut akan disajikan dalam bentuk grafik/bagan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Tampilan menu utama tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6 : Tampilan Menu Pelayanan Publik Mandiri



Gambar 7 : Tampilan Menu Informasi Desa



Gambar 8 : Tampilan Menu Pengolahan Data Desa

3. Tahap Pelatihan

Tahapan selanjutnya yaitu pelatihan kepada perangkat desa dan masyarakat dalam rangka pengenalan dan pengelolaan platform digital sistem informasi desa yang telah dikembangkan. Pelatihan ini tim pengabdian telah menyiapkan materi untuk mengenalkan dan melatih perangkat desa dalam mengelola platform digital sistem informasi desa. Pelatihan diikuti oleh 15 orang peserta dari perangkat desa, kepala dukuh, dan perwakilan masyarakat. Pada pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan pre-tes dan post-tes untuk mengukur pemahaman perangkat desa dan masyarakat terhadap materi yang disampaikan. Dari hasil pre-tes dan post-tes yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman perangkat desa dan masyarakat akan platform digital sistem informasi desa yang telah dikembangkan. Hasil pre-tes dan post-tes pelatihan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Pre-tes dan Post-tes Pelaksanaan Pelatihan

Butir Pertanyaan	Pre-tes		Post-tes	
	Benar	Salah	Benar	Salah
Apakah Saudara pernah mengakses sistem informasi desa?	2	13	15	0
Apa yang Saudara ketahui tentang sistem informasi desa?	0	15	15	0
Menu apa yang terdapat pada sistem informasi desa?	3	15	15	0
Manfaat apa yang diperoleh pada penggunaan sistem informasi desa?	0	15	15	0
Bagaimana cara mengakses sistem informasi desa?	0	15	15	0
Siapa saja yang dapat mengakses sistem informasi desa?	5	10	15	0

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh tim memberikan manfaat pada peningkatan pemahaman perangkat desa dan masyarakat akan pengenalan dan pengelolaan platform digital sistem informasi desa. Dari sebelum mengikuti pelatihan perangkat desa dan masyarakat belum mengetahui tentang apa itu sistem informasi desa, menu, cara, manfaat dan siapa saja yang dapat mengakses, dengan mengikuti pelatihan menjadi paham akan semua itu. Pelatihan tidak berhenti sampai tahap ini saja, melainkan tim pengabdian memfasilitasi perangkat desa melalui pembuatan *Whatapp group* yang dapat dimanfaatkan oleh perangkat desa untuk selalui berkomunikasi dengan tim. Media ini dianggap sebagai media yang tepat untuk saat ini supaya tim pengabdian dapat memastikan pengelolaan dan pemanfaat platform digital sistem informasi desa dapat dijalankan secara optimal.

4. Tahap Implementasi

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Saat ini platform digital sistem informasi desa yang telah dikembangkan sedang dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Tlemang dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Tahapan implementasi ini tetap dilakukan pendampingan oleh tim pengabdian. Sampai saat ini belum ada keluhan atau kendala yang disampaikan oleh perangkat desa atau operator kepada tim. Hal ini menunjukkan bahwa tahap implementasi dapat berjalan dengan baik. Besar harapan tim pengabdian keberadaan platform digital sistem informasi desa yang telah dikembangkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi perangkat desa dan masyarakat Desa Tlemang.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pendampingan tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai upaya adaptasi desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di era new normal dilakukan di Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Hasil dari kegiatan pendampingan ini yaitu tim berhasil mengembangkan platform digital sistem informasi desa dengan URL desatlemang.org. Platform digital sistem informasi digital tersebut sesuai dengan identifikasi dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Setidaknya terdapat 3 menu utama dalam platform digital sistem informasi desa yang telah dikembangkan yaitu menu pelayanan publik mandiri, menu pengelolaan informasi desa, dan menu pengolahan data desa. Dari hasil pelatihan yang dilakukan tim kepada perangkat desa dan masyarakat menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman perangkat desa dan masyarakat akan platform digital sistem informasi desa. Saat ini telah sampai tahap implementasi terhadap platform digital sistem informasi desa yang telah dikembangkan. Tim memfasilitasi pendampingan lanjutan melalui media *Whatsapp group*.

SARAN

Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan terdapat beberapa saran dari tim pengabdian untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penerapan platform digital sistem informasi desa antara lain : a) Pemerintah Desa Tlemang harus membuat *taskforce* atau bagian khusus yang memiliki tupoksi pengelolaan sistem informasi desa, b) Pemerintah Desa Tlemang membuat perencanaan perekrutan tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sistem informasi desa supaya dapat lebih optimal, c) Pemerintah Desa Tlemang harus melakukan pengadaan dan perawatan terhadap infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistem informasi desa supaya tidak digunakan untuk aktivitas yang lainnya, dan e) Pemerintah Desa Tlemang harus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi desa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya yang telah memberikan pendanaan sehingga program kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terselenggara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Ibrahim Osman. 2020. Examining E-government. Development Effects on Corruption in Africa : The Mediating Effects of ICT Development and Institutional Quality. *Technology in Society Journal*
- Apriyansyah, dkk. 2018. Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. *JAKKP : Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik Volume 4 Nomor 1 Juni 2018*
- Eprilianto, Deby Febriyan, dkk. 2019. Mewujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital. *Journal Public Sector Innovation : Volume 4 Nomor 1 November 2019*
- Heeks, Richard. 2011. Understanding E-government for Development. *Jurnal : Institute for Development Policy and Management University of Manchester*
- Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government
- Kumar, R., A. Sachan and A. Mukherjee. 2018. Direct vs indirect e-government adoption: an exploratory study. *Digital Policy, Regulation and Governance 20 (2)*
- Muhyiddin. 2020. Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan : The Indonesian Journal of Development Planning Volume 4 Nomor 2 Juni 2020*
- Nugroho, Rossi Adi. 2020. Kajian Analisis Model E-Readiness dalam Rangka Implementasi E-Government. *Masyarakat Telematika dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Volume 11*
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 tahun 2018 tentang Desa Karakter Unggul dan Pintar

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 147.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan
- Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wahidah, Idah, dkk. 2020. Pandemik Covid-19 : Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *JMO : Jurnal Manajemen dan Organisasi Volume 11 Nomor 3 Desember 2020*